Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas:

**(Indek Reformasi Birokrasi= IRB=72)**

2.2. mengeliminasi/mengganti peraturan yang menghambat biro krasi dan pemberian pelayanan.

2.1. melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan

1.1. Melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir

3.1. Penyederha naan birokrasi

4.1. Melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik

5.1. melaksanakan

merit system

5.2. melaksanakan

pengkaderan pejabat struktural / fungsional

4.2.. penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja

pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja,

6.1. meningkatan efektivitas dan

efisiensi anggaran

7.1. membangun budaya anti korupsi

8.1. membangun budaya memberikan pelayanan prima

4.2.1. menyusun perencanaan kinerja

pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja,

5.2.1. memberikan bim bingan kinerja, penilaian kinerja,

8.1.4. pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP),

8.1.1. pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat),

8.1.2. peningkatan Profesionalisme SDM,

8.1.3. peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana

8.1.5. pengelolaan konsultasi dan pengaduan

8.1.6. penyelenggaraan inovasi layanan public (SIPOTDES, E MONEV)

7.1.1. merintis pembangunan ZI

(Zona Integritas)

7.1.2. melaksanakan pembayaran non tunai

6.1.1. Menyusun dan melaksanakan SPIP

6.1.2. melaksanakan pengadaan melalui aplikasi (SIRUP, E Katalog, e purchasing dll)

7.1.3. melaksanakan monev dan pelaporan subkegiatanrutin dan berkala (POK/TW)

6.1.3. melaksanakan pengawasan berjen jang (pengellola keu angan, pengawasan internal dan ekternal

5.1.1. seleksi pejabat structural / fungsional sesuai kapasitas dan kebutuhan

4.1.1. melaksanakan administrasi perkantoran melalui aplikasi (SIPD, SRIKANDI, SMART SAKIP, dll)

6.1.2. melaksanakan perubahan jabatan eselon IV ke fungsional

2.2.1. melakukan inventarisasi peraturan

1.1.1. mengadakan FGD,Workshop Bimtek, Standarisai Kapasitas ASN, dll

1.1.1. membuat rencana penetapan peraturan (Perda, Perbup, SK)

1.1.2. mengadakan Rakor internal, pembinaan pegawai dll

2.2.2. melakukan iharmonisasai dan sinkronisasi peraturan

Manajemen Perubahan

Penataan Organisasi

Penataan Tatalaksana

Penataan SDM Aparatur

Deregulasi Kebijakan

Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Pengawasan

Peningkatan Kualitas Layanan Publik